



2024

LAKIP LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

**DINAS KETENAGAKERJAAN
KOTA PEMATANGSIANTAR**



KATA PENGANTAR

Puji Syukur Kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat Rahmat dan KaruniaNya penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Ketenagakerjaan Kota Pematangsiantar Tahun Anggaran 2024 dapat diselesaikan.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun Anggaran 2024 ini disusun sebagai Pertanggungjawaban Dinas Ketenagakerjaan Kota Pematangsiantar yang berkaitan dengan paparan pertanggungjawaban atas keberhasilan/kegagalan dalam pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis.

Kiranya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) yang telah disusun ini dapat memberi manfaat bagi seluruh pihak yang berkepentingan. Kritikan dan saran yang disampaikan akan menjadi masukan bagi kami untuk memperbaiki laporan dimasa depan.

Pematangsiantar, Pebruari 2025

**Kepala Dinas Ketenagakerjaan
Kota Pematangsiantar**



ROBERT SITANGGANG, S.STP, M.Si

PEMBINA

NIP. 198107132000121001

DAFTAR ISI

	Hal
Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
BAB I : PENDAHULUAN	1
1.1 Penjelasan Umum	1
1.2 Aspek Strategis Organisasi	3
1.3 Permasalahan Umum (Isue Strategis)	10
BAB II : PERENCANAAN KINERJA	12
2.1 Ikhtisar Perjanjian Kinerja	12
2.2 Indikator Kinerja Utama	14
BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA	16
3.1 Capaian Kinerja Organisasi	16
3.1.1 Perbandingan antara Target dan Realisasi Tahun ini	18
3.1.2 Perbandingan antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun ini dengan Tahun lalu dan beberapa tahun terakhir	21
3.1.3 Perbandingan Realisasi Kinerja sampai dengan Tahun ini dengan Target Jangka Menengah	23
3.1.4 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun ini dengan Standar Nasional	24
3.1.5 Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Kinerja serta Alternative Solusi yang Telah dilakukan	24
3.1.6 Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	29
3.1.7 Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja	36
3.2 Realisasi Anggaran	39
BAB IV : PENUTUP	43
LAMPIRAN	
1. PERJANJIAN KINERJA	
2. INDIKATOR KINERJA UTAMA	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 PENJELASAN UMUM

Terwujudnya good governance and clean government merupakan tuntutan dalam penyelenggaraan manajemen pemerintahan dan pembangunan yang berdaya guna dan berhasil guna serta bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Hal ini merupakan amanat Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang mewajibkan seluruh instansi pemerintah untuk mempertanggung-jawabkan seluruh kegiatan yang dilaksanakan dengan anggaran negara dalam bentuk Laporan Akuntabilitas Kinerja.

Tata pemerintahan yang baik (good governance) memiliki tiga landasan yang utama yaitu: transparansi, akuntabilitas dan partisipasi. Akuntabilitas dalam hal ini merupakan perwujudan kewajiban seseorang atau unit organisasi untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Ketenagakerjaan Kota Pematangsiantar merupakan perwujudan pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan yang telah ditetapkan dalam dokumen rencana strategis. Sesuai dengan Permenpan 53 tahun 2014. Sesuai dengan siklusnya, setelah selesai pelaksanaan tahun anggaran 2024, Organisasi Pemerintah Daerah menyusun LAKIP 2024 yang merupakan laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggung jawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi. LAKIP berisi ikhtisar pencapaian sasaran sebagaimana yang ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja dan dokumen perencanaan.

Dokumen LAKIP bukan dokumen yang berdiri sendiri, namun terkait dengan dokumen lain yaitu Indikator Kinerja Utama (IKU), RPJMD/Renstra SKPD, RKPD/Renja SKPD, Perjanjian Kinerja (PK), dan Rencana Kinerja Tahunan (RKT). Tujuan penyusunan LAKIP adalah menyajikan pertanggungjawaban kinerja instansi pemerintah Dinas Ketenagakerjaan Kota Pematangsiantar dalam mencapai sasaran strategis instansi sebagaimana telah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja di awal tahun anggaran. Dokumen LAKIP ini dapat digunakan sebagai :

1. Sumber informasi untuk mengetahui tingkat keberhasilan pencapaian kinerja Dinas Ketenagakerjaan Kota Pematangsiantar dengan pembandingan hasil pengukuran kinerja dan penetapan kinerja;
2. Bahan evaluasi untuk mengetahui tingkat akuntabilitas kinerja Dinas Ketenagakerjaan Kota Pematangsiantar;
3. Bahan evaluasi untuk penyusunan rencana kegiatan dan kinerja Dinas Ketenagakerjaan Kota Pematangsiantar pada tahun berikutnya.

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah ini adalah untuk memberikan gambaran yang jelas, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan Dinas Ketenagakerjaan Kota Pematangsiantar selama Tahun 2024. Hasilnya diharapkan dapat membantu pimpinan dan seluruh jajaran Dinas Ketenagakerjaan Kota Pematangsiantar dalam mencermati berbagai permasalahan sebagai bahan acuan dalam Menyusun program di tahun berikutnya. Dengan demikian program ditahun mendatang dapat disusun dengan lebih fokus, efektif, efisien, terukur, transparan serta dapat dipertanggungjawabkan.

Dasar Hukum

1. Undang-undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih, bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah;
10. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
14. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 12 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Ketenagakerjaan Tahun 2020-2024;
15. Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 4 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Pematangsiantar Tahun 2005-2025 ;
16. Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 7 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Dearah (RPJMD) Kota Pematansiantar Tahun 2022-2027;
17. Peraturan Wali Kota Pematangsiantar Nomor 27 Tahun 2022 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Pematangsiantar.

1.2 ASPEK STRATEGIS DINAS KETENAGAKERJAAN KOTA PEMATANGSIANTAR

Dinas Ketenagakerjaan Kota Pematangsiantar dipimpin oleh Kepala Dinas yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota

melalui Sekretaris Daerah Kota Pematangsiantar, sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Wali Kota Pematangsiantar Nomor 01 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Pematangsiantar Nomor 04 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas-dinas Daerah Kota Pematangsiantar.

Bagian dari bentuk penyelenggaraan tugas-tugas tata pemerintahan di daerah salah satunya adalah pelaksanaan tugas di bidang ketenagakerjaan yang bertanggung jawab kepada Wali Kota Pematangsiantar sebagaimana termuat dalam Peraturan Wali Kota Pematangsiantar Nomor 27 Tahun 2022 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Pematangsiantar.

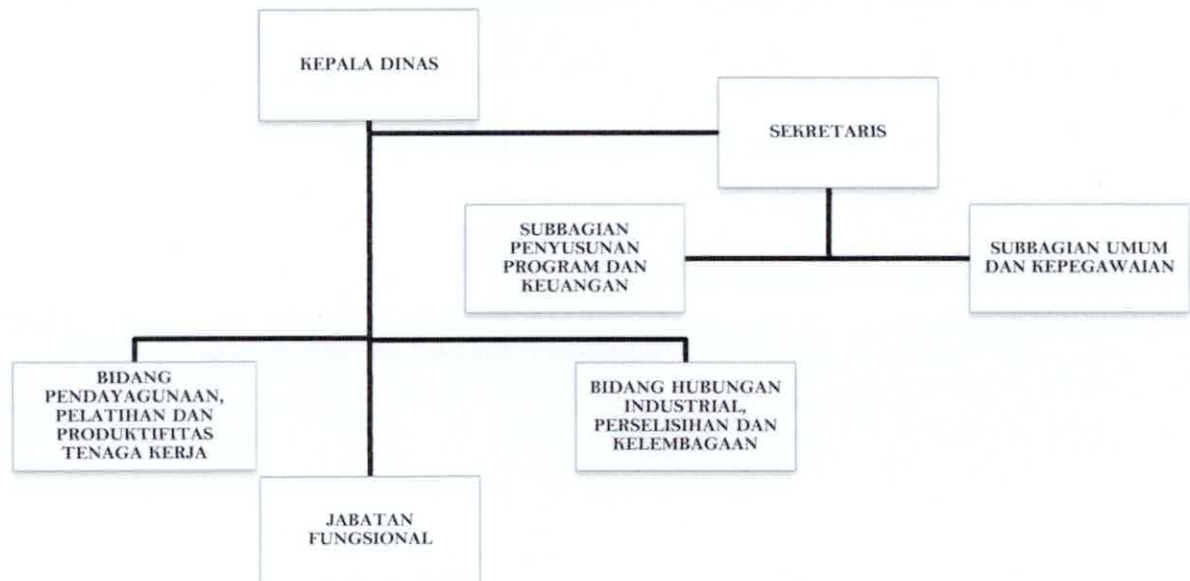
Dalam melaksanakan tugas Dinas Ketenagakerjaan Kota Pematangsiantar mempunyai fungsi :

1. Perumusan kebijakan teknis dalam rangka perencanaan, pembinaan dan pembangunan di bidang ketenagakerjaan sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Wali Kota.
2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya.
3. Pelaksanaan pengentasan kemiskinan dan pengendalian atas pelaksanaan tugas bidang ketenagakerjaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Pengelolaan administrasi umum yang meliputi pekerjaan ketatalaksanaan, keuangan, kepegawaian dan perlengkapan/peralatan
5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Wali Kota terkait tugas dan fungsinya.

Struktur organisasi Dinas Ketenagakerjaan Kota Pematangsiantar sesuai Peraturan Wali Kota Pematangsiantar Nomor 27 Tahun 2022 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Pematangsiantar adalah sebagai berikut :

Gambar. 1.1

STRUKTUR ORGANISASI DINAS KETENAGAKERJAAN KOTA PEMATANGSIANTAR



Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas sebagai berikut:

1. KEPALA DINAS

1. Mempunyai tugas membantu Wali Kota melaksanakan urusan pemerintah bidang ketenagakerjaan
2. Dinas Ketenagakerjaan dalam melaksanakan tugas dan menyelenggarakan fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan teknis dalam rangka perencanaan, pembinaan dan pembangunan di bidang tenaga kerja sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Walikota;
 - b. Penyelenggaraan urusan pemerintah dan pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugas nya;
 - c. Pelaksanaan pengentasan kemiskinan dan pengendalian atas pelaksanaan tugas bidang tenaga kerja sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
 - d. Pengelolaan administrasi umum yang meliputi pekerjaan ketatalaksanaan keuangan, kepegawaian dan perlengkapan/peralatan; dan
 - e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai bidang tugas dan fungsinya.

2. SEKRETARIAT

1. Sekretaris dinas merupakan unsur staf yang dipimpin oleh sekretaris dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada dinas dan bertugas

mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan administrasi perkantoran, surat menyurat, keuangan, kepegawaian, perlengkapan perkantoran, kerumah tanggaan dan barang inventaris lainnya dan mengkoordinasikan program/kegiatan yang diselenggarakan bidang-bidang.

2. Sekretaris dinas dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:
 - a. Perumusan , Perencanaan, evaluasi serta pelaporan program/kegiatan dan anggaran di lingkungan dinas;
 - b. Pelaksanaan pengelolaan administrasi surat menyurat , ketatausahaan, arsip, urusan rumah tangga dan pengadaan, inventarisasi, pemeliharaan aset, serta pengelolaan administrasi kepegawaian dan pembinaan pegawai dalam rangka peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) di lingkungan dinas;
 - c. Pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan di lingkungan dinas;
 - d. Pelaksanaan koordinasi program/kegiatan yang diselenggarakan bidang-bidang di lingkungan dinas;
 - e. Penyelenggaraan pengelolaan barang milik negara dan layanan pengadaan barang/jasa;
 - f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan kepada dinas.

Penjabaran tugas dibagi ke dalam subbagian yang dipimpin oleh Kepala Subbagian dan dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris sebagai berikut:

- a. Subbagian Penyusunan Program dan Keuangan, mempunyai tugas:
 - 1) Menyelenggarakan urusan yang meliputi perencanaan program/kegiatan anggaran, evaluasi dan pelaporan dilingkungan dinas;
 - 2) Menyelenggarakan pengelolaan keuangan perbendaharaan, akuntansi, verifikasi, pengajian pegawai, pelaporan keuangan, tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dilingkungan dinas;
 - 3) Melaksanakan tugas lain yang diberikan sekretaris dinas sesuai bidang tugas dan fungsinya.
- b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, mempunyai tugas :
 - 1) Menyelenggarakan manajemen perkantoran/ketatausahaan pengadaan surat menyurat pendistribusian surat menyurat, pengarsipan surat menyurat, hubungan masyarakat dilingkungan dinas;

- 2) Menyelenggarakan manajemen rumah tangga serta pengadaan pemeliharaan, inventarisasi aset dilingkungan dinas;
- 3) Menyelenggarakan manajemen administrasi kepegawaian koordinasi pembinaan kepegawaian dilingkungan dinas.
- 4) Melaksanakan tugas lain yang diberikas sekretaris dinas sesuai bidang tugas dan fungsinya.

3. BIDANG PENDAYAGUNAAN PELATIHAN DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA

1. Bidang Pendayagunaan, Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja, merupakan unsur pelaksanaan yang dipimpin seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berkoordinasi dengan Sekretaris serta berada di bawah dan ebrtanggungjawab kepada Kepala Dinas.
2. Pendayagunaan, Pelatihan, dan Produktivitas Tenaga Kerja melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas di bidang pendayagunaan, pelatihan, dan produktivitas tenaga kerja.

Bidang Pendayagunaan, Pelatihan, dan Produktivitas Tenaga Kerja dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:

- a. Pelaksanaan sebagian tugas kepala dinas dibidang Pendayagunaan Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja yang berhungan dengan penempatan tenaga kerja yang baik didalam dan diluar negeri dan penyuluhan usaha mandiri serta melaksanakan pembinaan terhadap latihan dan produktivitas, informasi pasar kerja dan penyusunan syalabi dan monitoring pelatihan;
- b. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai bidang dan tugas fungsinya.

a. BIDANG HUBUNGAN INDUSTRIAL, PERSELISIHAN DAN KELEMBAGAAN

1. Bidang Hubungan Industrial, Perselisihan, dan Kelembagaan merupakan unsur pelaksana yang dipimpin seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berkoordinasi dengan Sekretaris serta berada dibawah dan ebrtanggung jawab kepada Kepala Dinas.
2. Bidang Hubungan Industrial, Perselisihan, dan Kelembagaan melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas di Bidnag Hubungan Industrial, Perselisihan, dan Kelembagaan.

Bidang Hubungan Industrial, Perselisihan, dan Kelembagaan dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:

- a. Pelaksanaan pembinaan yang meliputi bidang industrial, perselisihan, dan kelembagaan;
- b. Pelaksanakan konsultasi dan rapat –rapat dengan organisasi ketenagakerjaan instansi terkait pihak-pihak lain yang berkompeten dengan masalah kasus ketenagakerjaan
- c. Pengkoordinasikan kegiatan-kegiatan bripatit dan tripartit
- d. Pelaksanakan laporan pelaksanaan tugas-tugas ketenagakerjaan
- e. Pelaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai bidang dan tugas dan fungsinya.

Pemerintah Daerah adalah implementator kebijakan publik yang mengemban tugas dan fungsi-fungsi pelayanan, perlindungan dan pemberdayaan masyarakat. Oleh karena itu, pemerintahan di masa mendatang adalah pemerintahan yang cerdas, yang mampu menerjemahkan kebijakan publik ke dalam langkah-langkah operasional yang kreatif dan inovatif dengan orientasi pada kepentingan masyarakat. Pemerintahan yang cerdas hanya bisa diwujudkan jika aparturnya cerdas. Terkait dengan hal tersebut di atas, jumlah aparatur Dinas Ketenagakerjaan Kota Pematangsiantar berdasarkan data dari Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sampai Bulan Desember Tahun 2024 berjumlah 27 orang. Berdasarkan data yang ditampilkan pada Tabel 1.1, dengan jenjang eselon II.

Tabel 1.1
Jumlah Pegawai ASN Dinas Ketenagakerjaan Kota Pematangsiantar
yang Menduduki Eselon, Jabatan Fungsional Tertentu dan Jabatan Pelaksana

No.	Jabatan	Jumlah (Pegawai)	Persentase terhadap Pegawai ASN
1	Eselon II	1	3,70
2.	Eselon III	3	11,11
3.	Eselon IV	2	7,40
4.	Jabatan Fungsional Tertentu	3	11,11
5.	Jabatan Pelaksana	11	40,74
6.	Non PNS	7	25,93

Sumber : Dinas Ketenagakerjaan Kota Pematangsiantar, 2024

Kapasitas dan kapabilitas pegawai berkaitan erat dengan tingkat pendidikannya. Berdasarkan data yang ditampilkan pada Tabel 1.2, tingkat pendidikan Pegawai Dinas Ketenagakerjaan yang paling banyak adalah pendidikan S-1 sebanyak 16 orang (59,26%). Tingkat pendidikan bagian terbesar dari pegawai Dinas Ketenagakerjaan yang relatif

tinggi ini merupakan modal dasar yang penting dalam peningkatan kinerja Dinas Ketenagakerjaan secara umum. Jumlah pegawai Dinas Ketenagakerjaan yang menamatkan pendidikan S-2 cukup besar, tercatat sebanyak 4 orang. Secara persentase, jumlah tersebut mencapai 14.81% dari seluruh pegawai Dinas Ketenagakerjaan, dan ini tentu menjadi modal dasar yang besar dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi ketenagakerjaan sebagai lembaga perencana secara optimal.

Tabel 1.2
Jumlah Pegawai ASN dan Non ASN Dinas Ketenagakerjaan Pematangsiantar
Berdasarkan Jenjang Pendidikan

No.	Jenjang Pendidikan	ASN			NON ASN		
		Jumlah (Pegawai)	Persentase terhadap ASN (%)	Persentase terhadap Seluruh Jumlah Pegawai	Jumlah (Pegawai)	Persentase terhadap Non ASN (%)	Persentase terhadap Seluruh Jumlah Pegawai
1.	Perguruan Tinggi						
	S2	4	20	14.81	-	-	-
	S1	12	60	44.44	4	57.14	14.81
2.	Bukan Perguruan Tinggi						
	SMA	4	20	14.81	3	42.85	11.11
	Jumlah	20			7		

Sumber : Dinas Ketenagakerjaan Kota Pematangsiantar Tahun 2024

Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada berdasarkan data kepegawaian Dinas Ketenagakerjaan Kota Pematangsiantar pada tahun 2024, ada dua yaitu jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) sebanyak 20 pegawai, yang terdiri dari 9 pegawai laki-laki (45%) dan 11 pegawai perempuan (55%) dan pegawai yang bukan merupakan Aparatur Sipil Negara (pegawai Non ASN) sebanyak 7 pegawai, yang terdiri dari 3 pegawai Non ASN laki-laki (42.85%) dan 4 pegawai Non ASN perempuan (57.14%). Sehingga jumlah total pegawai ASN dan Non ASN pada Sumber daya manusia (SDM) yang ada berdasarkan data kepegawaian Dinas Ketenagakerjaan Kota Pematangsiantar pada tahun 2024.

Tabel 1.3
Jumlah Pegawai ASN dan Non ASN Dinas Ketenagakerjaan
Kota Pematangsiantar Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	ASN			NON ASN		
		Jumlah (Pegawai)	Persentase terhadap ASN (%)	Persentase terhadap Seluruh Jumlah Pegawai	Jumlah (Pegawai)	Persentase terhadap Non ASN (%)	Persentase terhadap Seluruh Jumlah Pegawai
1.	Laki-laki	9	45	33.33	3	42.85	11.11
2.	Perempuan	11	55	40.74	4	57.14	14.81

Jumlah	20		7	
Jumlah	27			

Sumber : Dinas Ketenagakerjaan Kota Pematangsiantar Tahun 2024

Selanjutnya untuk pegawai ASN bila dilihat dari golongan / ruang dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 1.4
Jumlah Pegawai ASN Dinas Ketenagakerjaan Kota Pematangsiantar
Berdasarkan Golongan Ruang

No.	Golongan Ruang	Jumlah (Pegawai)	Persentase terhadap Pegawai ASN %
1	Golongan IV	6	30
	IV/b	3	15
	IV/a	3	15
2	Golongan III	11	55
	III/d	7	35
	III/c	1	5
	III/b	1	5
	III/a	2	10
3	Golongan II	3	15
	II/d	1	5
	II/c	2	10
	Jumlah	20	100

Sumber : Dinas Ketenagakerjaan Kota Pematangsiantar Tahun 2024

1.3 PERMASALAHAN UMUM (STRATEGIC ISSUE)

Penyelenggaraan pelayanan dibidang ketenagakerjaan secara teknis dilakukan oleh Dinas Ketenagakerjaan Kota Pematangsiantar terus berupaya meningkatkan daya saing tenaga kerja yang berkualitas sesuai dengan kebutuhan pasar ke depan. Peningkatan daya saing di Kota Pematangsiantar dilakukan melalui pelatihan kerja, pelayanan penempatan kerja, memfasilitasi perusahaan dengan tenaga kerja dan perlindungan tenaga kerja.

Masih tingginya angkatan kerja yang berpendidikan dasar ke bawah menyebabkan sulitnya tenaga kerja untuk bersaing dengan tenaga kerja yang dari luar daerah khususnya pada jenis pekerjaan yang membutuhkan pengetahuan dan keterampilan tinggi, selain itu

dunia ketenagakerjaan sekarang ini dihadapkan pada kecenderungan baru yaitu berupa pergeseran pengangguran terbuka dari angkatan kerja berpendidikan rendah menuju kearah angkatan kerja berpendidikan yang lebih tinggi.

Tabel 1.5
Pemetaan Permasalahan Pelayanan
Dinas Ketenagakerjaan Kota Pematang Siantar

No.	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1.	Rendahnya Penyerapan Tenaga Kerja	Rendahnya Kualiatas dan Produktivitas Tenaga Kerja	<ol style="list-style-type: none"> 1. Masih rendahnya tenaga kerja yang terampil dan memiliki kompetensi yang sesuai kebutuhan pasar kerja 2. Identifikasi Kebutuhan pelatihan belum dapat dilakukan dengan baik (jejaring/kerjasama, kejuruan unggulan). 3. Terbatasnya jumlah dan kualitas sarana dan prasarana pelatihan kerja.
		Rendahnya penempatan pencari kerja	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah angkatan kerja yang tidak sebanding dengan kesempatan kerja mengakibatkan tidak semua angkatan kerja dapat diserap oleh lapangan kerja (pengangguran). 2. Kurangnya sosialisasi dan informasi pasar kerja 3. Kurangnya kesadaran Penyedia kerja untuk melaporkan informasi lowongan kerja kepada Dinas Ketenagakerjaan Kota Pematangsiantar 4. Kurangnya Kemampuan/Mutu serta Pendidikan yang dimiliki pencari kerja dalam mengisi lowongan kerja yang tersedia

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 IKHTISAR PERJANJIAN KINERJA

Rencana Kinerja merupakan penjabaran dari RENSTRA Dinas Ketenagakerjaan Kota Pematangsiantar Tahun 2022-2027. Renstra Dinas Ketenagakerjaan Kota Pematangsiantar selanjutnya dijabarkan dalam Rencana Kinerja Tahunan (RKT) yang disusun setiap tahun. RKT memuat informasi tentang:

- Tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dalam tahun yang bersangkutan;
- Cara mencapai tujuan dan sasaran berupa Kebijakan, Program, dan Kegiatan serta indikator kinerja kegiatan dan target capaiannya.

Sasaran yang ingin dicapai Dinas Ketenagakerjaan selama tahun 2024 dengan indikator dan target capaiannya dibawah ini dan secara rinci disajikan di dalam Tabel 2.1 Rencana Kinerja Tahunan (RKT) sebagai berikut :

Tabel 2.1
Rencana Kinerja Tahunan dicapai Dinas Ketenagakerjaan Kota
Pematangsiantar selama Tahun 2024

No	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2024
	Meningkatnya Penyerapan Tenaga Kerja	Meningkatnya Kompetensi Tenaga Kerja	Persentase Pencari Kerja yang Dilatih	%	92
		Meningkatnya Penempatan Tenaga Kerja	Persentase Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	%	73.35
			Persentase Pencari Kerja yang Ditempatkan	%	68.75
		Meningkatnya Pelayanan Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat	Predikat	80
			Inovasi Perangkat Daerah	Inovasi	1
			Capaian Nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)	Capaian	B

Perjanjian Kinerja adalah komitmen Kepala Dinas Ketenagakerjaan kepada Wali Kota Pematangsiantar untuk mendukung pelaksanaan pembangunan berdasarkan tugas pokok fungsi Dinas yang dipimpin. Selanjutnya, menjadi laporan

pertanggungjawaban Dinas Ketenagakerjaan pada akhir tahun anggaran sekaligus menjadi bahan evaluasi pencapaian target pelaksanaan pembangunan dan penilaian hasil kinerja, berikut dibawah ini tabel perjanjian kinerja tahun 2024

Tabel 2.2
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
DINAS KETENAGAKERJAAN KOTA PEMATANGSIANTAR

Sasaran Startegis	Indikator Kinerja	Target Kinerja (PK)	Realisasi	Capaian Kinerja
Meningkatnya Kompetensi Pencari Kerja	Persentase Pencari Kerja yang Dilatih	92%	99.75	108.42
Meningkatnya Penempatan Tenaga Kerja	Persentase Tenaga Kerja yang ditempatkan	68.75%	73.08%	106.29
	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	73.35%	71.82%	97.91%
Meningkatnya Pelayanan Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat	80	88.88	111,1
	Inovasi Perangkat Daerah	1	1	100
	Capaian Nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)	B	B	

Tabel 2.3
Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2024

No	Sasaran/Program	Indikator	Satuan Indikator	Kinerja			Anggaran		
				Target	Realisasi	Capaian (%)	Alokasi	Realisasi	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Meningkatnya Kompetensi Pencari Kerja	Persentase Pencari Kerja yang Dilatih	%	90	97.75	108.6	749.209.195	725.761.609	96.87
	1) PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase Pencari Kerja yang dilatih	%	90	97.75	108.6	749.209.195	725.761.609	96.87
2.	Meningkatnya Penempatan Tenaga Kerja	Persentase Penempatan Tenaga Kerja		68.75	73.08	106.2	540.216.083	520.902.555	96.42

	1) PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	Persentase Dokumen Rencana Tenaga Kerja Yang Diimplementasikan	%	100	100	100	22.633.390	18.571.204	82.05
	2) PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan Luar Negeri) melalui mekanisme layanan antar kerja dalam wilayah Kab/Kota	%	68.75	73.08	106.2	41.604.860	38.796.055	93.25
	3) PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Persentase perselisihan/konflik yang diselesaikan	%	100	100	100	475.977.833	463.535.296	97.39
3.	Meningkatnya Pelayanan Perangkat Daerah	Capaian Nilai AKIP	Predik at	B	B		3.236.444.189	2.911.260.521	89.95
	1) PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	Capaian AKIP Perangkat Daerah	Predik at	B	B		3.236.444.189	2.911.260.521	89.95

2.2 INDIKATOR KINERJA UTAMA

Rencana Strategis Dinas Ketenagakerjaan Kota Pematangsiantar Tahun 2022-2027 dimaksudkan sebagai dasar penyusunan kebijakan, program, kegiatan dan indikator (tolak ukur) kinerja kegiatan Dinas Ketenagakerjaan dalam pencapaian visi, misi serta tujuan organisasi. Adapun tujuan strategis Ketenagakerjaan Tahun 2022 sampai 2027 meliputi adalah meningkatnya penyerapan tenaga kerja.

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik di Indonesia diterbitkannya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Adapun penetapan Indikator Kinerja Utama Dinas Ketenagakerjaan Kota Pematangsiantar Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.4
Indikator Kinerja Utama Dinas Ketenagakerjaan Kota Pematangsiantar Tahun 2024

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Alasan Pemilihan Indikator	Formula/Rumus Perhitungan Capaian IKU	Sumber Data
1.	Meningkatnya Kompetensi Tenaga Kerja	Persentase Pencari Kerja yang Dilatih	Untuk Meningkatkan Kualitas Tenaga Kerja	$\frac{\text{Jumlah Pencari Kerja yang dilatih}}{\text{Jumlah Pencari Kerja yang mendaftar}} \times 100 \%$	Dinas Ketenagakerjaan
2.	Meningkatnya Penempatan Tenaga Kerja	Persentase Pencari Kerja yang Ditempatkan	Meningkatkan Penempatan Pencari Kerja	$\frac{\text{Jumlah Pecari Kerja yang ditempatkan}}{\text{Jumlah Pencari Kerja yang mendaftar}} \times 100 \%$	Dinas Ketenagakerjaan
		Persentasae Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	Meningkatkan Partisipasi Tenaga Kerja dalam Kegiatan Perekonomian	$\frac{\text{Jumlah Angkatan Kerja}}{\text{Jumlah Tenaga Kerja}} \times 100 \%$	BPS

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Pengukuran capaian sasaran bertujuan untuk mengetahui tingkat keberhasilan dan kegagalan Dinas Ketenagakerjaan Kota Pematangsiantar dalam merealisasikan target- target yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah. Pengukuran capaian indikator kinerja Dinas Ketenagakerjaan menggunakan ketentuan sebagai berikut :

1. Predikat nilai capaian kinerja dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal dengan pendekatan petunjuk pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja sebagai berikut :

No	Kategori	Nilai	Interpretasi
1	AA	➤ 90-100	Sangat Memuaskan
2	A	➤ 80-90	Memuaskan
3	BB	➤ 70-80	Sangat Baik
4	B	➤ 60-70	Baik
5	CC	➤ 50-60	Cukup (Memadai)
6	C	➤ 30-50	Kurang
7	D	➤ 0-30	Sangat Kurang

2. Penetapan angka capaian kinerja sasaran yang mencapai angka lebih dari 100% termasuk pada angka capaian kinerja 100%. Angka capaian kinerja sasaran yang mencapai angka kurang dari 0% termasuk pada angka capaian kinerja 0.
3. Cara menghitung presentase capaian indikator kinerja adalah :
 - a. Bila mana Indikator Sasaran mempunyai makna progress positif, yaitu semakin tinggi realisasinya menunjukkan semakin tinggi kinerjanya atau semakin rendah realisasinya menunjukkan semakin rendah kinerjanya, maka capaian kinerjanya menggunakan rumus :

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

- b. Bila mana Indikator Sasaran mempunyai makna progress negative, yaitu semakin tinggi realisasinya menunjukkan semakin rendah kinerjanya atau semakin rendah realisasinya menunjukkan semakin tinggi kinerjanya, maka capaian kinerjanya menggunakan rumus :

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{\text{Target} - (\text{Realisasi} - \text{Target})}{\text{Target}} \times 100\%$$

Secara umum Dinas Ketenagakerjaan Kota Pematngsiantar telah dapat melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam RENSTRA Dinas Ketenagakerjaan Kota Pematangsiantar Tahun 2022-2027. Jumlah Sasaran yang ditetapkan untuk mencapai misi dan visi Kota Pematangsiantar Tahun 2022-2027 sebanyak 3 (tiga) sasaran. Tahun 2024 adalah tahun ketiga pelaksanaan Rencana Strategis Dinas Ketenagakerjaan Kota Pematangsiantar, dari sebanyak 3 (tiga) sasaran strategis dengan sebanyak 3 (tiga) indikator kinerja utama yang ditetapkan dengan hasil pencapaian kinerja sasaran Dinas Ketenagakerjaan Kota Pematangsiantar sebagaimana yang tertera pada Tabel 2.2 diatas. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja tersebut dapat diperoleh data dan informasi kinerja sebagaimana tercantum pada beberapa tabel berikut:

Tabel 3.1
Pencapaian Kinerja Dinas Ketenagakerjaan Kota Pematangsiantar Tahun 2024

No	Tingkat Capaian Kinerja	Jumlah Indikator	Capaian	Predikat
1	Melebihi/Melampaui Target	3	>100%	Sangat Tercapai
2	Sesuai Target	2	= 100%	Tercapai
3	Tidak Mencapai Target	1	<100%	Tidak Tercapai

Dari tabel 3.1 diatas dapat diketahui bahwa tingkat capaian kinerja ketiga Indikator Sasaran Strategis Dinas Ketenagakerjaan Kota Pematangsiantar Tahun 2024 yang telah ditetapkan 3 indikator dapat melebihi/melampaui target (>100%) dan masuk pada kategori sangat berhasil, 2 indikator masuk pada kategori tercapai dan 1 indikator tidak tercapai.

3.1.1 Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun ini

Tabel 3.1
Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja

No	Indikator Kinerja	Target Kinerja (PK)	Realisasi	Capaian Kinerja
1	Persentase Pencari Kerja yang Dilatih	92%	99.75	108.42
2	Persentase Tenaga Kerja yang ditempatkan	68.75%	73.08	106.29
3	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	73.35%	71.82%	97.91%
4	Indeks Kepuasan Masyarakat	80	88.88	111,1
	Inovasi Perangkat Daerah	1	1	100
5	Capaian Nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)	B	B	

Pencapaian Kinerja Dinas Ketenagakerjaan Tahun 2024 sebagai berikut:

SASARAN 1 Persentase Pencari Kerja yang dilatih

- Persentase Pencari Kerja yang dilatih ditargetkan 92%**, realisasi sampai bulan Desember 2024 sebesar 99.75% , dengan rincian:

PENINGKATAN KOMPETENSI TENAGA KERJA KOTA PEMATANGSIANTAR TAHUN 2024				
JENIS PELATIHAN	JUMLAH PESERTA PELATIHAN/SUMBER PEMBIAYAAN			
	APBD-DAU	APBD-DBHCHT	UPT. DISNAKER PROVSU- BLK PEMATANGSIANTAR	BBPVP MEDAN- TMT
Tata Rias Kecantikan Rambut			24	48
Barista			24	
Pengolahan Hasil Pertanian			32	13
Otomotif Sepeda Motor			13	
Menjahit			12	
Desain Grafis			24	37
Las SMAW 2F			8	
Teknisi HP			36	
Basic Office			13	
Pelatihan Tenun		16		
Pelatihan Bordir		16		
Menjahit		16		
Desain Grafis		16		
Tata Rias Kecantikan Rambut		16		
Otmotif Sepeda motor	16			
Barbershop	10			
Massage & Spa	16			
JUMLAH	42	80	186	98

TOTAL PESERTA PELATIHAN DI TAHUN 2024 = 406 ORANG

- Kerjasama antara Dinas Ketenagakerjaan Kota Pematangsiantar dengan Dinas Ketenagakerjaan Provinsi Sumatera Utara melalui UPT Pelatihan Tenaga Kerja menggunakan dana Dinas Ketenagakerjaan Propsumut melaksanakan pelatihan kerja terhadap 186 orang pencari kerja Kota Pematangsiantar dengan rincain Tata

Rias Kecantikan Rambut 24 orang, Barista 24 orang, Pengolahan Hasil Pertanian 32 orang, Otomotif Sepeda Motor 13 orang, Manjahit 12 orang, Desain Grafis 24 orang, Las SMAW 2F 8 orang, Teknisi HP 36 orang dan Basic Office 13 orang. Kesemua peserta dinyatakan lulus dengan memiliki sertifikat kompetensi pada pelatihannya masing-masing

- Pelaksanaan Pelatihan Keterampilan Kerja oleh Dinas Ketenagakerjaan Kota Pematangsiantar bersumber dari
 - DBHCHT Tahun 2024 sebanyak 80 orang dengan rincian Pelatihan desain grafis 16 orang, Tenun 16 Orang, Bordir 16 Orang, Tata Busana/menjahit 16 orang dan Tata Kecantikan Rambut/Salon 16 orang. Peserta dinyatakan lulus dengan memiliki sertifikat pada pelatihannya masing-masing sebanyak 79 orang dan 1 orang pada Pelatihan Bordir dinyatakan tidak lulus karena tidak mengikuti pelatihan keterampilan kerja.
 - APBD-DAU sebanyak 42 orang dengan rincian pelatihan Otomotif Sepeda Motor 16 orang, Massage & Spa 16 orang dan Barbershop 10 orang, dan ke 42 peserta pelatihan dinyatakan lulus dengan memiliki sertifikat kompetensi pada pelatihan masing-masing
- Pelaksanaan Pelatihan Keterampilan Kerja oleh BBPVP Medan (Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Medan)- Kemnaker RI melalui Program Tailor Made Training (TMT) Bidang Desain Grafis 37 orang, Tata Kecantikan Rambut 48 orang dan Pengolahan Hasil Pertanian 13 orang Kesemua peserta dinyatakan lulus dengan memiliki sertifikat kompetensi pada pelatihannya masing-masing

Persentase Pencari Kerja yang dilatih	Jumlah Pencari Kerja yang dilatih		
	<hr/>	X	100%
	Jumlah Pencari Kerja yang mendaftar		
Persentase Pencari Kerja yang dilatih	405		
	<hr/>	X	100%
	406		
Persentase Pencari Kerja yang dilatih =		99.75%	

SASARAN 2 Persentase Pencari Kerja yang Ditempatkan

2. **Persentase Pencari Kerja yang ditempatkan ditargetkan sebesar 68.75% realisasi sampai bulan Desember 2024 sebesar 73.08 %**, nilai ini berdasarkan data Dinas Ketenagakerjaan Tahun 2024

Banyaknya kerjasama dan fasilitasi lowongan kerja yang dilakukan oleh Dinas Ketenagakerjaan Kota Pematangsiantar dengan penyedia kerja terkait Informasi Lowongan Kerja ada sebanyak 322 lowongan kerja untuk Laki-laki dan 545 Lowongan kerja untuk perempuan dengan penempatan pada AKAD, AKL dan AKAN. Peran serta 11 BKK yang ada di SMK Kota Pematangsiantar memberikan dampak yang sangat baik terhadap penyerapan dan penempatan tenaga kerja

Rekapitulasi Penempatan Tenaga Kerja Tahun 2024			REKAPITULASI LOWONGAN KERJA TAHUN 2024			
Bulan	Pencari Kerja	Penempatan	DAFTAR LOWONGAN		KETERANGAN	
			LAKI	LAKI PEREMPUAN		
Januari	18	18	2	5	AKAN	
Pebruari	33	13	12	28	AKAN/AKAD/AKL	
Maret	63	16	14	52	AKAN/AKAD/AKL	
April	26	54	2	22	AKAN/AKAD/AKL	
Mei	16	29	38	15	AKAN/AKAD/AKL	
Juni	9	1	186	321	AKAN/AKAD/AKL	
Juli	24	9	25	25	AKAN/AKAD/AKL	
Agustus	23	6	12	24	AKAD/AKL	
September	17	2	6	5	AKAN/AKAD/AKL	
Oktober	34	25	14	33	AKAN/AKAD/AKL	
Nopember	29	18	19	15	AKAN/AKAD/AKL	
Desember	87	86	0			
JUMLAH	379	277	322	545		

DAFTAR BKK DI KOTA PEMATANGSIANTAR	
1	SMK Swasta GKPI 2
2	SMK Swasta Taman Siswa
3	SMK Swasta Pelita
4	SMK Swasta HKBP
5	SMK Swasta Cinta Rakyat
6	SMK Swasta Teladan
7	SMK Negeri 1 Pematangsiantar
8	SMK Negeri 2 Pematangsiantar
9	SMK Swasta GKPI 1
10	SMK Swasta Bintang Timur
11	SMK Swasta GKPS 2

Persentase Pencari Kerja yang ditempatkan

Jumlah Pencari Kerja yang ditempatkan

$$\frac{\text{Jumlah Pencari Kerja yang ditempatkan}}{\text{Jumlah Pencari Kerja yang mendaftar}} \times 100\%$$

Persentase Pencari Kerja yang ditempatkan

277 orang

$$\frac{277 \text{ orang}}{379 \text{ orang}} \times 100\% = 73.08 \%$$

3. **Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja ditargetkan 73.35%, realisasi sampai bulan Desember 2024 sebesar 71.82% ,** nilai ini berdasarkan data BPS- Kota Pematangsiantar Dalam Angka 2025

Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan ¹ <i>Educational Attainment¹</i>	Bukan Angkatan Kerja <i>Not Economically Active</i>	Jumlah <i>Total</i>	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) <i>Labour Force Participation Rate (%)</i>
(1)	(6)	(7)	(8)
0	9.903	26.818	63,07
1	17.249	41.732	58,67
2	26.378	103.999	74,64
3	6.041	38.883	84,46
Jumlah/Total	59.571	211.432	71,82

SASARAN 3 Meningkatnya Pelayanan Perangkat Daerah

- Indeks Kepuasan Masyarakat ditargetkan sebesar 80% realisasi sampai bulan Desember 2024 sebesar 88.88%, nilai ini berdasarkan data Dinas Ketenagakerjaan Tahun 2024 sampai bulan Desember 2024 dengan responden survei sebanyak 1.433 orang
- Inovasi Perangkat Daerah, realisasi pada sasaran kinerja telah dilaksanakan Inovasi Perangkat Daerah dengan judul "Perlindungan CPMI Melalui Rekomendasi Lurah Kota Pematangsiantar (Lindungi PMI Pematangsiantar)"

3.1.2 Perbandingan Capaian Kinerja Tahun ini dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir

Tabel 3.2
Capaian Kinerja dibandingkan tahun sebelumnya

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2022	Realisasi 2022	Target 2023	Realisasi 2023	Target 2024	Realisasi 2024
Meningkatnya Kompetensi Pencari Kerja	Persentase Pencari Kerja yang Dilatih	88 %	100%	90 %	94.97 %	92%	99.75
Meningkatnya Penempatan Tenaga Kerja	Persentase Tenaga Kerja yang ditempatkan	64.28 %	26.83%	66.67%	56.53%	68.75%	73.08%
	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	70.58%	65.27 %	72.44	70.96%	73.35%	71.82%
Meningkatnya Pelayanan Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat	-	-	-	-	80	88.88
	Inovasi Perangkat Daerah	-	-	-	-	1	1
	Capaian Nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)	-	-	-	-	B	B

Sumber data Dinas Ketenagakerjaan Kota pematangsiantar

Dari Tabel 3.2 di atas terlihat :

1. Capaian Persentase Pencari Kerja yang dilatih dari Tahun 2022 sampai dengan tahun 2024 terjadi peningkatan yaitu capaian 100%; 94.97 %; dan 99.75%. peningkatan capaian ini akibat adanya kerjasama dengan Dinas Ketenagakerjaan Provinsi Sumatera Utara melalui UPT Pelatihan Tenaga Kerja Dinas Ketenagakerjaan Provinsi Sumatera Utara di Simalungun serta Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BBPVP) Medan Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia dalam hal pelaksanaan pelatihan keterampilan kerja berbasis kompetensi

Tabel 3.3
Capaian Persentase Pencari Kerja yang Dilatih Tahun 2022-2024

Tahun Pelaksanaan	Pencari Kerja yang Mendaftar	Pencari Kerja yang Dilatih	Capaian
2022	20 Peserta	20 Peserta	100%
2023	199 Peserta	189 Peserta	94.97%
2024	406 Peserta	405 Peserta	99.75%

Sumber data : Dinas Ketenagakerjaan Kota Pematangsiantar

2. Capaian Persentase Tenaga Kerja yang ditempatkan dari Tahun 2022 sampai dengan tahun 2024 adalah Capaian tenaga kerja yang ditempatkan 26.83%; 55.53%; dan 73.08%.Peningkatan capaian ini akibat peran aktif BKK serta semakin banyaknya kerjasama dan fasilitasi Dinas Ketenagakerjaan Kota Pematangsiantar dengan penyedia kerja terkait lowongan kerja di Kota Pematangsiantar

Tabel 3.4
Capaian Persentase Tenaga Kerja yang Ditempatkan Tahun 2022-2024

Tahun Pelaksanaan	Tenaga Kerja yang Mendaftar	Tenaga Kerja yang Ditempatkan	Capaian
2022	712 Tenaga Kerja	191 Tenaga Kerja	26.83%
2023	306 Tenaga Kerja	173 Tenaga Kerja	55.53%
2024	379 Tenaga Kerja	277 Tenaga Kerja	73.08%

Sumber data : Dinas Ketenagakerjaan Kota Pematangsiantar

3. Capaian Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja dari Tahun 2022 sampai dengan Tahun 2024 adalah mengalami peningkatan dari 65,27%; 70.96% dan 71.82% hanya saja tidak memenuhi target yang sudah ditetapkan

Tabel 3.5
Capaian Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Tahun 2022-2024

Tahun Pelaksanaan	Jumlah Angkatan Kerja	Jumlah Penduduk Usia Kerja	Capaian
2022	200.085	130.588	65.27%
2023	209.203	148.460	70.96%
2024	211.432	151.861	71.82%

Sumber data : BPS- Kota Pematangsiantar dalam Angka

3.1.3 Perbandingan Realisasi Kinerja sampai dengan Tahun ini dengan Target Jangka Menengah

Tabel 3.3
Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET sampai dgn 2024 (%)	REALISASI sampai dgn 2024 (%)	Target Renstra	Capaian
1	Persentase Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	73.35	71.82	75,91	94.61
2	Persentase Tenaga Kerja yang Dilatih	92	99.75	98	101.78
3	Persentase Pencari Kerja yang Ditempatkan	68.75	73.08	73,69	99.17
4	Indeks Kepuasan Masyarakat	80	88	86	102.32
5	Inovasi Perangkat Daerah	1	1	1	100
6	Capaian Nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)	C	B	B	B

Tabel diatas menunjukkan realisasi kinerja tujuan dan sasaran selama 5 tahun dari tahun 2022-2027. Pada tahun 2024, Dinas Ketenagakerjaan Kota pematangsiantar telah melaksanakan seluruh program dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya. Sesuai dengan Perjanjian Kinerja pada Indikator Kinerja Utama perbandingan rata-rata realisasi indikator kinerja sampai dengan tahun 2024 terhadap target kinerja jangka menengah dalam Renstra Dinas Ketenagakerjaan Tahun 2022-2027, maka secara umum belum semua indikator telah mencapai target jangka menengah. Meskipun

terdapat indikator yang pencapaiannya sudah mencapai 102.32% .

3.1.4 Perbandingan Realisasi Kinerja sampai dengan Tahun ini dengan Capaian Nasional Tahun 2024

Tabel 3.4

NO	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Daerah	Nasional	Ket
1	Persentase Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	Persentase Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	71.82%	71.10%	BPS
2	Persentase Tenaga Kerja yang Dilatih	Persentase Tenaga Kerja yang Dilatih	99.75%	-	
3	Persentase Pencari Kerja yang Ditempatkan	Persentase Pencari Kerja yang Ditempatkan	73.08%	-	

Sumber Data : Badan Pusat Statistik Kota Pematangsiantar

Dari Tabel diatas terlihat bahwa Capaian TPAK Dinas tahun 2024 diatas capaian Nasioanal dengan selisih 0,72%

3.1.5 ANALISIS PENYEBAB KEBERHASILAN/KEGAGALAN KINERJA SERTA ALTERNATIVE SOLUSI YANG TELAH DILAKUKAN

analisis penyebab keberhasilan/kegagalan kinerja serta alternatif solusi pada masing-masing sasaran strategis melalui pelaksanaan program dan kegiatan secara rinci dapat dijelaskan sebagai berikut :

Sasaran 1

Meningkatnya Kompetensi Pencari Kerja

No	Sasaran	Indikator	Satuan	Kinerja			Keuangan			
				Target	Realisasi	(%)				
1	Meningkatnya Kompetensi Tenaga Kerja	1.1 Persentase Pencari Kerja yang Dilatih	%	92%	99.75%	108.42	1 Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	749.209.195	725.761.609	96.87
CAPAIAN DARI 1 INDIKATOR						108.42	TOTAL PER SASARAN	749.209.195	725.761.609	96.87
TINGKAT EFEKTIFITAS 111.923 %										

Pencapaian kinerja sasaran ini sangat didukung oleh beberapa faktor, antara lain :

1. Adanya Kerjasama Dinas Ketenagakerjaan Kota Pematangsiantar dengan Dinas Ketenagakerjaan Propinsi Sumatera Utara melalui UPT Pelatihan Tenaga Kerja dan Kementerian Ketenagakerjaan melalui BBPVP Medan dalam melaksanakan pelatihan keterampilan kerja berbasis kompetensi
2. Masih tetap tingginya antusiasme peserta pelatihan dalam mengikuti program pelatihan. Peserta pelatihan merupakan pencari kerja yang lulus seleksi dari sekian banyak pencari kerja yang terdaftar.
3. Program Pelatihan yang diselenggarakan sesuai kebutuhan pasar kerja saat ini sehingga minat pencari kerja dalam mengikuti pelatihan sangat tinggi
4. Terjalinnya koordinasi dan kerjasama yang baik dengan Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) sehingga pelaksanaan pelatihan dapat berjalan sesuai yang diharapkan.

Adapun yang menjadi permasalahan (kegagalan) yang dihadapi saat ini yang dapat mempengaruhi intervensi program pelatihan bagi pencari kerja adalah :

1. Semakin tingginya jumlah pencari kerja yang akan dilatih sehingga dibutuhkan penambahan anggaran program pelatihan.
2. Masih rendahnya kualitas LPK sehingga dibutuhkan pembinaan melalui sertifikasi LPK
3. Adanya Miss match antara kurikulum pendidikan dan pelatihan dengan kebutuhan industri dan dunia usaha sehingga dibutuhkan koordinasi yang baik dan kolaborasi antar instansi terkait
4. Perkembangan Teknologi informasi yang sangat cepat yang menuntut peningkatan kualitas SDM para pencari kerja.
5. Masih terbatasnya anggaran untuk mengeksekusi berbagai program dan kegiatan yang mendukung.

Untuk mengatasi berbagai hambatan-hambatan diatas, upaya yang harus dilakukan dalam peningkatan capaian indikator kinerja sasaran 1 ini pada tahun-tahun selanjutnya melalui pelaksanaan program dan kegiatan yaitu :

1. Pemetaan program pelatihan prioritas sehingga dapat mengefektifkan penggunaan anggaran pelatihan yang tersedia
2. Pembinaan LPK dengan mendorong dilakukannya sertifikasi bagi semua LPK yang ada di Kota Medan guna peningkatan kualitas pelatihan yang diselenggarakan
3. Koordinasi yang baik antar instansi terkait dan seluruh stakeholder untuk meningkatkan konektifitas dan kesesuaian kurikulum pelatihan dengan kebutuhan dunia usaha dan dunia industri.

Sasaran 2
Meningkatnya Penempatan Tenaga Kerja

No	Sasaran	Indikator		Satuan	Kinerja			Keuangan				
					Target	Realisasi	(%)					
1	Meningkatnya Penempatan Tenaga Kerja	1.1	Persentase Tenaga Kerja yang Ditempatkan	%	68.75%	73.08%	106.29	1	Program Perencanaan Tenaga Kerja	22.633.390	18.571.204	82.05
		1.2	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	%	73.35	71.82	97.91	2	Program Penempatan tenaga Kerja	41.604.860	38.796.055	93.25
		CAPAIAN DARI 1 INDIKATOR					101.956	TOTAL PER SASARAN				
TINGKAT <u>EFEKTIFITAS</u> 114.172%												

Adapun faktor pendorong yang mendukung capaian kinerja tersebut diatas adalah :

1. Adanya Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro memiliki peran strategis dalam menyelaraskan antara kebutuhan pasar tenaga kerja dan ketersediaan tenaga

kerja yang ada di daerah

2. Terjalannya hubungan kerjasama dan kolaborasi dengan berbagai stakeholder yang terkait dengan ketenagakerjaan seperti perusahaan yang bersedia melaporkan lowongan kerja
3. Pelaksanaan Sosialisasi Layanan Antar Kerja bagi siswa/i SMK sebagai bekal dan persiapan dalam memasuki dunia kerja
4. Adanya Aplikasi Siap Kerja oleh Kemenaker Republik Indonesia yang terintegrasi dengan segala pelayanan ketenagakerjaan seperti kartu pencari kerja, lowongan kerja dll, pelatihan

Dibalik pencapaian tersebut, yang menjadi permasalahan (kegagalan) yang dihadapi saat ini yang mempengaruhi pelaksanaan program penempatan kerja bagi pencari kerja adalah :

1. Tidak seimbangnya peningkatan jumlah pencari kerja dengan ketersediaan lowongan pekerjaan sehingga tingkat penyerapan tenaga kerja masih rendah
2. Tingginya angka pengangguran bagi lulusan SMK yang seyogiannya merupakan lulusan yang siap kerja sehingga kerjasama dengan dunia usaha dan dunia industri sangat dibutuhkan untuk meningkatkan lapangan kerja bagi tamatan SMK
3. Perkembangan Teknologi informasi yang sangat cepat yang menuntut peningkatan kualitas SDM para pencari kerja.
4. Masih terbatasnya anggaran untuk mengeksekusi berbagai program dan kegiatan yang mendukung penempatan tenaga kerja

Untuk mengatasi berbagai permasalahan diatas, upaya yang harus dilakukan dalam rangka peningkatan capaian indikator kinerja sasaran 2 ini pada tahun-tahun selanjutnya melalui pelaksanaan program dan kegiatan yaitu :

1. Melaksanakan sosialisasi Wajib Laport info Lowongan Kerja bagi Penyedia Kerja/Perusahaan
2. Program dan kegiatan yang dilaksanakan tidak hanya fokus dalam penyediaan informasi lowongan kerja untuk ditempatkan pada perusahaan-perusahaan tetapi juga fokus pada program untuk penciptaan wirausaha baru
3. Diperlukan kerjasama dengan dunia usaha dan dunia industri dalam hal penyediaan lowongan kerja bagi tamatan SMK serta peningkatan kualitas lulusan SMK
4. Terus mengaktifkan Bursa Kerja Khusus di SMK-SMK Kota Pematangsiantar
5. Pemanfaatan Teknologi Informasi secara optimal melalui penyediaan layanan aplikasi yang terupdate dan sesuai dengan kebutuhan teknologi saat ini untuk

memberi kemudahan akses baik bagi perusahaan sebagai penyedia lowongan kerja maupun bagi para pencari kerja.

Sasaran 3

Meningkatnya Pelayanan Perangkat Daerah

Dalam mencapai sasaran ke 3 ini terdapat 3 indikator kinerja yaitu Indeks Kepuasan Masyarakat, Inovasi Perangkat Daerah serta Capaian Nilai AKIP upaya yang harus dilakukan dalam rangka peningkatan capaian indikator kinerja sasaran 3 antara lain:

1. Meningkatkan Pelayanan terhadap pengguna layanan melalui Survei Kepuasan Masyarakat
2. Melaksanakan Inovasi Perangkat Daerah sebagai upaya dalam meningkatkan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dalam mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan Pelayanan Publik
3. Membuat target capaian kinerja yang selaras pada setiap dokumen perencanaan kinerja
4. Laporan kinerja menyajikan perbandingan yang selaras antara realisasi kinerja dengan target jangka menengah dari Rencana Strategis (Renstra), Perjanjian Kinerja, realisasi kinerja tahun-tahun sebelumnya dan realisasi kinerja dilevel nasional sesuai dengan tahun yang berkenaan

3.1.6 ANALISIS DAN EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA

Pencapaian 3 sasaran strategis dengan 6 indikator kinerja Dinas Ketenagakerjaan Kota Pematangsiantar, didukung oleh anggaran dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.5
Realisasi Program Per Indikator Kinerja Kegiatan/Sub Kegiatan

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Kegiatan/Sub Kegiatan	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	Capaian (%)
				(Rp)	(Rp)	
A	Meningkatnya Pelayanan Perangkat Daerah	Capaian Nilai AKIP	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/ KOTA	3.236.444.189	2.911.260.521	89,95
I			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.454.128.581	2.155.511.382	87,83
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.454.128.581	2.155.511.382	87,83
II			Administrasi Umum Perangkat Daerah	323.143.178	302.524.991	93,62
1			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.872.898	3.812.737	98,45
2			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	54.764.803	53.245.650	97,23
3			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	7.939.520	7.807.352	98,34
4			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	24.489.000	6.504.000	26,56
5			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	31.241.957	30.662.411	98,14
6			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	200.835.000	200.492.841	99,83
III			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	86.361.630	85.486.625	98,99

1			Pengadaan Peralatan dan mesin Lainnya	86.361.630	85.486.625	98,99
IV			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	306.980.800	302.633.301	98,58
1			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	52.840.800	49.845.301	94,33
2			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	254.140.000	252.788.000	99,47
V			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	65.830.000	65.104.222	98,90
1			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	65.830.000	65.104.222	98,90
B	Meningkatkan Perempatan Tenaga Kerja	Persentase Pencari Kerja yang Ditempatkan	Program Perencanaan Tenaga Kerja	22.633.390	18.571.204	82,05
			Penyusunan Rencana Tenaga Kerja RTK	22.633.390	18.571.204	82,05
			Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro	22.633.390	18.571.204	82,05
C	Meningkatnya Kompetensi Tenaga Kerja	Persentase Pencari Kerja yang Dilatih	Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga	749.209.195	725.761.609	96,87
			Pelaksanaan Latihan Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	749.209.195	725.761.609	96,87
			Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	749.209.195	725.761.609	96,87
D	Meningkatkan Penempatan Tenaga Kerja	Persentase Pencari Kerja yang Ditempatkan	Program Penempatan Tenaga Kerja	41.604.860	38.796.055	93,25
			Pelayanan antar Kerja Lintas Daerah Kabupaten/Kota	41.604.860	38.796.055	93,25
			Pelayanan antar kerja	41.604.860	38.796.055	93,25
E			Program Hubungan Industrial	475.977.833	463.535.296	97,39

		Pencengahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Dearah Kabupaten/ Kota	475.977.833	463.535.296	97,39
		Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Dearah Kabupaten/Kota	475.977.833	463.535.296	97,39

Tabel 3.6
Perbandingan Capaian Kinerja dengan Anggaran

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Program	Kinerja				Realisasi		
				Target	Realisasi	Capaian	Target	Target	Realisasi	Capaian
Meningkatnya Pelayanan Perangkat Daerah		Capaian AKIP PD	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	26 orang	20 orang	76.92%	2.454.128.581		2.155.511.382	87.83%
				26 orang	20 orang	76.92%	2.454.128.581		2.155.511.382	87.83%
				9 Dokumen	9 Dokumen	100%	323.143.178		302.524.991	93.62%
				12 Paket	12 Paket	100%	3.872.898		3.812.737	98.45%
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12 Paket	12 Paket	100%	54.764.803		53.245.650	97.23%

					Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	12 Paket	12 Paket	100%	7.939.520	7.807.352	98.34%
					Penyediaan Bahan Logistik Kantor	12 Paket	12 Paket	100%	24.489.000	6.504.000	25.56%
					Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	12 Paket	12 Paket	100%	31.241.957	30.662.411	98.14%
					Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	100%	200.835.000	200.492.841	99.83%
					Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						
					Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	12 Paket	12 Paket	100%	86.361.630	85.486.625	98.99%
					Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						
					-Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Laporan	12 Laporan	100%	52.840.800	49.845.301	94.33%
					-Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 Laporan	12 Laporan	100%	254.140.000	252.788.000	99.47%

	Meningkatkan Penempatan Tenaga Kerja	Persentase Pencari Kerja yang Ditempaikan	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA									
				Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota	1500 Orang	1500 Orang	100%	41.604.860	38.796.055	93.25%		
				Pelayanan Antar Kerja								
			PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL									
			Pencengahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan penutupan Perusahaan di Deaeah Kabupaten/Kota									
				Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Dearah Kabupaten/Kota	2 Lembaga	2 Lembaga	100%	475.869.467	463.535.296	97.39%		

Tabel 3.7
Efisiensi Per Indiaktor Kinerja

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja (%)	Capaian Anggaran (%)	Efisiensi (%)
1	Meningkatnya Pelayanan Perangkat Daerah	Capaian AKIP PD	B	89.95	-
2	Meningkatnya Kompetensi Tenaga Kerja	Persentase Pencari Kerja yang Dilatih	97.75	96.87	99.09
		Persentase Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	73.35	-	-
3	Meningkatnya Penempatan Tenaga Kerja	Persentase Pencari Kerja yang Ditempatkan	73.08	96.42	131.93

Pada tabel di atas terlihat bahwa efisiensi penggunaan sumber daya pada indikator kinerja Ketenagakerjaan yang berkualitas terlihat sangat efisiensi dimana capaian kinerja jauh lebih besar dibanding anggaran yang digunakan. Dan ada indikator kinerja yang dikelola oleh BPS Kota Pematangsiantar sehingga hal ini tidak menggunakan anggaran dalam perolehan capaian kinerjanya

3.1.7 Analis Program/Kegiatan yang menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Tabel. 3.8
Analisa Program

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	% Capaian	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	% Capaian	Menunjang /Tidak menunjang
1	Meningkatnya kompetensi dan Kompetensi Pencari Kerja	Persentase Pencari Kerja yang Dilatih	108.42	Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase Pencari Kerja yang dilatih	96.87	menunjang
				Kegiatan Pelaksanaan Pelatihan Berbasis Kompetensi	Jumlah Pelaksanaan Pelatihan	200%	menunjang
2	Meningkatnya penempatan tenaga kerja	Persentase Tenaga Kerja yang Ditempatkan	106.29	Program Penempatan Tenaga Kerja	Persentase Tenaga Kerja yang Ditempatkan (dalam dan Luar) melalui mekanisme layanan antar kerja dalam wilayah kab/kota	93.25	Menunjang
				Kegiatan Pelayanan Antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota	Pelayanan Antar Kerja di Kabupaten/Kota	100	Menunjang
				Program Perencanaan Tenaga Kerja	Dokumen Rencana Tenaga Kerja yang Disusun	82.05	Menunjang
				Kegiatan Penyusunan Rencana Tenaga Kerja	Rencana Tenaga Kerja yang ditetapkan	-	Menunjang
				Program Hubungan Industrial	Persentase Perselisihan ?Konflik yang diselesaikan	100	Menunjang
				Kegiatan Pencegahan Penyelessian Perselisihan HI, Mogok Kerja dan penutupan Perusahaan di Daerah Kab/Kota	Jumlah Perselisihan yang diselesaikan	100	menunjang
		Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	97.91	-	-	-	
3	Meningkatnya Pelayan Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat	-	-	-	-	

		Inovasi Perangkat Daerah		-	-		
		Capaian Nilai AKIP	B	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kab/Kota	Capaian AKIP PD	89.95	Menunjang

Program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian semua sasaran strategis ini adalah sebanyak 5 Program dan 9 kegiatan. Adapun pencapaian dari setiap program dan kegiatan tersebut diuraikan di bawah ini:

1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan;

Kegiatan:

- Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;
- Administrasi Umum Perangkat Daerah;
- Pengadaan Barang Milik DAerah Penunjang Pemerintahan Daerah;
- Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
- Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;

Realisasi Program dan Kegiatan:

- 100% Capaian Kinerja Pengelolaan Adminsitasi Keuangan;
- 100% Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum ;
- 100% Capaian Kinerja Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;
- 100% Capaian Kinerja Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;
- 100% Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

2) Program Perencanaan Tenaga Kerja

Kegiatan:

Penyusunan Rencana Tenaga Kerja RTK

Realisasi program dan kegiatan:

Ditetapkannya Rencana Tenaga Kerja hanya saja pada tahap ini penyusunan RTK Kota pematangsiantar masih tahap pengenalan/sosialisasi

3) Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja

Kegiatan:

Pelaksanaan Latihan Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi

Realisasi program dan kegiatan:

- a. Pelaksanaan Pelatihan Kerja bagi pencari kerja melalui DBHCHT-APBD Tahun Anggaran 2024 diikuti oleh 122 orang peserta pada 8 jenis pelatihan

4) Program Penempatan Tenaga Kerja**Kegiatan:**

Pelayanan antar Kerja Lintas Daerah Kabupaten/Kota

Realisasi program dan kegiatan:

Pelaksanaan Sosialisasi Pelayanan Antar kerja di Daerah Kabupaten/Kota yang diadakan di SMK-SMK Kota Pematangsiantar dan diikuti oleh 1500 peserta

5) Program Hubungan Industrial**Kegiatan:**

- a. Rapat Depeko
- b. Pembinaan Perusahaan dalam Pembuatan PP,PKB dan PKWT
- c. Pelaksanaan Rapat Tripartit
- d. Pelaksanaan, Pembinaan dan Penanganan Hubungan Industrial

Realisasi program dan kegiatan:

- a. Ditetapkannya UMK dan Upah Minimum Sektorat Kota Pematangsiantar;
- b. Terbinanya Lembaga Tripartit;
- c. terselesaikannya kasus/konflik hubungan industrial
- d. Terbinanya Perusahaan dalam pembuatan PP, PKB dan PKWT

Indikator kinerja Dinas Ketenagakerjaan Kota pematangsiantar yang tidak tercapai adalah Tingkat Partisipasi Angaktan Kerja hal ini dikarenakan data tersebut berasal dari BPS Kota Pematangsiantar Tahun 2025, namun begitu secara umum kinerja Dinas Ketenagakerjaan Kota pematangsiantar mencapai hasil yang baik. Adapun faktor-faktor yang menjadi pendorong keberhasilan pencapaian kinerja, antara lain :

1. Adanya dana yang diakomodir untuk melaksanakan kegiatan yang tercantum dalam DPA;
2. Program dan kegiatan yabg terarah dari renstra, renja sampai dengan Perjanjian Kinerja Dinas Ketenagakerjaan Kota Pematangsiantar
3. Adanya koordinasi dengan Disnaker Provsu melalui BLK dan Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Medan sehingga pencari kerja yang terdapat pada Dinas Ketenagakerjaan Kota Pematangsiantar dapat melakukan seleksi dan pelatihan

sesuai dengan kompetensinya

4. Adanya Aplikasi Siap Kerja oleh Kemenaker Republik Indonesia yang terintegrasi dengan segala pelayanan ketenagakerjaan seperti kartu pencari kerja, lowongan kerja dll, pelatihan
5. Adanya Monitoring terdapat LPKS (Lembaga Pelatihan Kerja Swasta) sehingga LPKS yang ada dapat dikelompokkan dan dimonitoring dalam perizinan dan pelaksanaan kegiatan
6. Adanya Pembinaan LKS Tripartit dibentuk untuk mendeteksi secara dini isu ketenagakerjaan, dan menyinergi kebijakan pemerintah dalam menyelesaikan permasalahan yang muncul dalam ketenagakerjaan
7. Adanya Koordinasi antara Dinas Ketenagakerjaan Kota Pematangsiantar dengan Pekerja, pengusaha Serikat Buruh/Serikat Pekerja dan pihak terkait sebagai wadah dalam mewujudkan hubungan industrial yang harmonis, dinamis dan berkeadilan antara pihak pekerja/buruh, pengusaha dan Pemerintah.
8. Aktipnya BKK yang ada di SMK-SMK Kota Pematangsiantar

3.2 REALISASI ANGGARAN

Anggaran keuangan dalam pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Ketenagakerjaan Kota Pematangsiantar tahun 2024 yang merupakan input dari keseluruhan kegiatan terdiri dari:

1. Belanja Tidak Langsung

Belanja Tidak Langsung yang terdiri dari belanja Gaji dan Tunjangan ASN serta tambahan penghasilan bagi aparatur target sebesar Rp. 3.289.248.581,- dan yang terealisasi sebesar Rp. 2.979.296.282,- atau 90.57%.

Realisasi Belanja Tidak Langsung Dinas Ketenagakerjaan Kota Pematang Siantar Tahun 2024.

No	Uraian	Target	Realisasi	%
1	2	3	4	5
1	Gaji pokok PNS	1.244.411.558	1.063.396.472	85.45
2	Tunjangan Keluarga	146.591.563	116.680.288	79.60
3	Tunjangan Jabatan ASN	139.869.450	92.554.950	66.17
4	Tunjangan Fungsional ASN	20.100.000	13.940.000	69.35

5	Tunjangan Fungsional Umum ASN	28.593.810	26.385.000	92.28
6	Tunjangan Beras ASN	79.687.927	59.094.720	74.16
7	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	2.397.744	2.381.434	99.32
8	Pembulatan Gaji ASN	76.529	13.618	17.79
9	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja ASN	792.400.000	781.064.900	98.571
Total		3.289.248.581	2.979.296.282	90.57

2. Belanja Langsung

Dana yang dianggarkan dan realisasinya untuk belanja langsung yang telah ditetapkan tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Realisasi Belanja Langsung Dinas Ketenagakerjaan Kota Pematang Siantar Tahun 2024.

PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN		JUMLAH PAGU	REALISASI KEUANGAN		SISA
			Rp	%	
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.236.444.189	2.911.260.521	89.95	325.183.668
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.454.128.581	2.155.511.382	87.83	298.617.199
	1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.454.128.581	2.155.511.382	87.83	298.617.199
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	323.143.178	302.524.991	93.62	20.618.187
	1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.872.898	3.812.737	98.45	60.161
	2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	54.764.803	53.245.650	97.23	1.519.153
	3 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	7.939.520	7.807.352	98.34	132.168
	4 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	24.489.000	6.504.000	26.56	17.985.000

	5 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	31.241.957	30.662.411	98.14	579.546
	6 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	200.835.000	200.492.841	99.83	342.159
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	86.361.630	85.486.625	98.99	875.005
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	86.361.630	85.486.625	98.99	875.005
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	306.980.800	302.633.301	98.58	4.347.499
	1 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	52.840.800	49.845.301	94.33	2.995.499
	2 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	254.140.000	252.788.000	99.47	1.352.000
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	65.830.000	65.104.222	98.90	725.778
	1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	65.830.000	65.104.222	98.90	725.778
II	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	22.633.390	18.571.204	82.05	4.062.186
	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja RTK	22.633.390	18.571.204	82.05	4.062.186
	1 Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro	22.633.390	18.571.204	82.05	4.062.186
III	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	749.209.195	725.761.609	96.87	23.447.586
	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	749.209.195	725.761.609	96.87	23.447.586
	1 Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelathan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	749.209.195	725.761.609	96.87	23.447.586
IV	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	41.604.860	38.796.055	93.25	2.808.805

	Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota	41.604.860	38.796.055	93.25	2.808.805
	1 Pelayanan Antar Kerja	41.604.860	38.796.055	93.25	2.808.805
V	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	475.977.833	463.535.296	97.39	12.442.537
	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, MOgok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	475.977.833	463.535.296	97.39	12.442.537
	1 Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Dearah Kabupaten/Kota	475.977.833	463.535.296	97.39	12.442.537

BAB IV

PENUTUP

Semua program dan kegiatan Dinas Ketenagakerjaan Kota Pematangsiantar telah dapat dilaksanakan dengan baik. Oleh karena perubahan kebijakan, baik yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Pematangsiantar maupun Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat, turut berpengaruh terhadap penyerapan anggaran yang telah direncanakan.

Laporan Kinerja SKPD Dinas Ketenagakerjaan Kota Pematangsiantar secara umum sudah mempedomani Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan ini diharapkan dapat menggambarkan pencapaian kinerja dilengkapi dengan analisis efektifitas dan efisiensi kegiatan selama kurun waktu tahun 2024, merupakan realisasi Program Kerja Tahun 2024 yang merupakan penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) Dinas Tahun 2022- 2027. Dari pelaksanaan berbagai program dan kegiatan tersebut dapat disimpulkan sebagai berikut :

- A. Secara garis besar capaian kinerja sasaran dapat tercapai, bahkan beberapa indikator kinerja melampaui target, meskipun masih ada yang belum sesuai dengan yang diharapkan
- B. Belum seluruh sasaran strategis menunjukkan nilai capaian seperti yang diharapkan, oleh karena itu perlu dilakukan evaluasi lebih lanjut sejak dari perencanaan, penganggaran dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran yang ditetapkan.

Langkah-langkah yang akan dilakukan untuk peningkatan kinerja ditahun berikutnya:

- 1. Melaksanakan kegiatan mengacu pada rencana aksi yang telah ditetapkan dengan menjabarkan target kinerja yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja serta memantau capaian secara berkala
- 2. Melakukan peningkatan kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia serta kualitas prosedur dan sarana kerja yang dapat menunjang tercapainya tujuan kerja
- 3. Melakukan analisis atas indikator kinerja yang tidak tercapai, sebagai bahan dalam review Renstra Dinas Ketenagakerjaan 2022-2027
- 4. Merbagai kegiatan yang dilaksanakan cukup memberi dampbelum sesuai dengan yang diharapkan, baik langsung maupun tidak langsung terhadap penyerapan tenaga kerja sehingga mendorong meningkatkan penempatan tenaga kerja
- e. Melaksanakan koordinasi baik intenal maupun ekstenal dalam peningkatan penyerapan tenaga kerja dan membangun komitmen dengan pihak terkait dengan

memperhatikan skala prioritas.

Demikian Laporan Kinerja ini disampaikan, sebagai laporan dan bahan evaluasi kinerja Dinas Ketenagakerjaan Kota Pematangsiantar selama tahun 2024. Kami menyadari masih terdapat kekurangan dalam penyusunan laporan ini, sehingga saran dan masukan sangat diharapkan guna perbaikan lebih lanjut. Terimakasih.

Pematang Siantar, Pebruari 2025

**KEPALA DINAS KETENAGAKERJAAN
KOTA PEMATANGSIANTAR**



**ROBERT SITANGGANG, S.STP, M.Si
PEMBINA**

NIP. 198107132000121001

LAMPIRAN



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
DINAS KETENAGAKERJAAN KOTA PEMATANGSIANTAR**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **ROBERT SITANGGANG, S.STP. M.Si**
Jabatan : **Plt. Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kota Pematangsiantar**

selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **dr. SUSANTI DEWAYANI, Sp.A**
Jabatan : **Wali Kota Pematangsiantar**

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama ini berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka pencapaian target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pematangsiantar, 20 Februari 2024

Pihak Kedua,

WALI KOTA PEMATANGSIANTAR


dr. SUSANTI DEWAYANI, Sp.A

Pihak Pertama,

**Plt. KEPALA DINAS KETENAGAKERJAAN
KOTA PEMATANGSIANTAR**


ROBERT SITANGGANG, S.STP, M.Si
PEMBINA
NIP.19810713 200012 1 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
Pit. KEPALA DINAS KETENAGAKERJAAN
KOTA PEMATANGSIANTAR

NO	Sasaran Strategi	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya Kompetensi Tenaga Kerja	Persentase Pencari Kerja yang dilatih	92 %
2	Meningkatnya Penempatan Tenaga Kerja	Persentase Pencari Kerja yang ditempatkan	68,75 %
		Persentase tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	73,35 %
3	Meningkatnya Pelayanan Perangkat Daerah	Capaian Nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)	B
		Indeks Kepuasan Masyarakat	80
		Inovasi Perangkat Daerah	1

PROGRAM	ANGGARAN
1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Rp 3.236.444.189,-
2. Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	Rp 749.209.195,-
3. Program Penempatan Tenaga Kerja	Rp 41.604.860,-
4. Program Hubungan Industrial	Rp 475.977.833,-
5. Program Perencanaan Tenaga Kerja	Rp 22.633.390,-
Total Anggaran	Rp 4.525.869.467,-

Pematangsiantar, 20 Februari 2024

Pihak Kedua,

WALI KOTA PEMATANGSIANTAR



dr. SUSANTI DEWAYANI, Sp. A

Pihak Pertama,

Pit. KEPALA DINAS KETENAGAKERJAAN
KOTA PEMATANGSIANTAR



ROBERT SITANGGANG, S.STP,M.Si
PEMBINA
NIP.19810713 200012 1 001

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
DINAS KETENAGAKERJAAN KOTA PEMATANG SIANTAR TAHUN 2024

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Alasan Pemilihan Indikator	Formula/Rumus Perhitungan Capaian IKU	Sumber Data
1.	Meningkatnya Kompetensi Tenaga Kerja	Persentase Pencari Kerja yang Dilatih	Untuk Meningkatkan Kualitas Tenaga Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang Terampil ----- X 100 % Jumlah Pencari Kerja yang mendaftar	Dinas Ketenagakerjaan
2.	Meningkatnya Penempatan Tenaga Kerja	Persentase Pencari Kerja yang Ditempatkan Persentase Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	Meningkatkan Penempatan Pencari Kerja Meningkatkan Partisipasi Tenaga Kerja dalam Kegiatan Perekonomian	Jumlah Pecari Kerja yang ditempatkan ----- X 100 % Jumlah Pencari Kerja yang mendaftar Jumlah Angkatan Kerja ----- X 100 % Jumlah Tenaga Kerja	Dinas Ketenagakerjaan BPS

Pematang Siantar, Maret 2024

KEPALA DINAS KETENAGAKERJAAN
KOTA PEMATANGSIANTAR



ROBERT SITANGGANG, S.STP., M.Si
PEMBINA
NIP.19810713 200012 1 001



PEMERINTAH KOTA PEMATANGSIANTAR
DINAS KETENAGAKERJAAN

Jalan Dahlia Nomor. 2, Pematangsiantar.

E-mail : disnaker@pematangsiantar.go.id ; Website : disnaker.pematangsiantar.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KETENAGAKERJAAN KOTA PEMATANGSIANTAR

NOMOR : 012 / 000.8.6.3 / 313 / 11 / 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN DAN PENANGGUNGJAWAB PENGUMPULAN

DATA/INFORMASI LAPORAN KINERJA

DINAS KETENAGAKERJAAN KOTA PEMATANGSIANTAR TAHUN 2024

KEPALA DINAS KETENAGAKERJAAN KOTA PEMATANGSIANTAR,

- Menimbang : a. bahwa menindaklanjuti Surat Sekretaris Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 002/000.8.6.3/116/II-2025 tanggal 26 Februari 2025 Hal Undangan;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas sistem akuntabilitas, kelancaran administrasi dan mewujudkan kecepatan akses, kualitas data kinerja yang akurat, valid dan dapat diandalkan dalam kinerja Dinas Ketenagakerjaan Kota Pematangsiantar, maka perlu Pembentukan Tim Penyusunan dan penanggungjawab Pengumpulan Data/Informasi Laporan Kinerja Dinas Ketenagakerjaan Kota Pematangsiantar Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan dalam satu keputusan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor

41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan lembaran negara Nomor 6322);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah/Negara;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Lpaoran dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintan Daerah (LEPPD);
6. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kienrja, Pelaporan Kienrja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 mencabut Permendagri Nomor 73 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Paeraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Thaun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri

Dalam negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

14. Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 8 Tahun 2012 tentang Tahapan, Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah Kota Pematangsiantar;
15. Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Pematangsiantar;
17. Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 2 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota pematangsiantar Tahun Anggaran 2025;
18. Peraturan Wali Kota Pematangsiantar Nomor 35 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kota Pematangsiantar
19. Peraturan Wali Kota Pematangsiantar Nomor 27 Tahun 2022 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Pematangsiantar.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Pembentukan Tim Penyusunan dan penanggungjawab Pengumpulan Data/Informasi Laporan Kinerja Dinas Ketenagakerjaan Kota Pematangsiantar Tahun 2024 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan;
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu Keputusan ini mempunyai tugas :
- a. Menyusun Laporan Kinerja Dinas Ketenagakerjaan Kota Pematangsiantar Tahun 2024;
 - b. mengumpulkan data/informasi Laporan Kinerja Dinas Ketenagakerjaan Kota Pematangsiantar Tahun Anggaran 2024.

- KETIGA : Biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.
- KEEMPAT : Keputusan Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kota Pematangsiantar ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pematangsiantar
pada tanggal



KEPALA DINAS,

ROBERT SITANGGANG, S.STP., M.Si

NIP. 19810713 200012 1 001

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Inspektur Kota Pematangsiantar;
2. Yang bersangkutan;
3. Peringgal.

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DINAS KETENAGAKERJAAN
KOTA PEMATANGSIANTAR

NOMOR : 012/000.8.6.3/313/11/2025

TANGGAL : Februari 2025

TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN DAN
PENANGGUNGJAWAB PENGUMPULAN
DATA/INFORMASI LAPORAN KINERJA DINAS
KETENAGAKERJAAN KOTA
PEMATANGSIANTAR TAHUN 2024

TIM PENYUSUN KINERJA DINAS KETENAGAKERJAAN KOTA PEMATANGSIANTAR

1. Penanggung Jawab : Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kota Pematangsiantar.
2. Ketua : Sekretaris Dinas Ketenagakerjaan Kota Pematangsiantar
3. Sekretaris : Kasubbag Penyusunan Program dan Keuangan pada Dinas Ketenagakerjaan Kota Pematangsiantar;
4. Anggota :
 1. Kepala Bidang Pendayagunaan, Pelatihan dan Produktifitas Tenaga Kerja Dinas Ketenagakerjaan Kota Pematangsiantar
 2. Kepala Bidang Hubungan Industrial, Perselisihan dan Kelembagaan pada Dinas Ketenagakerjaan Kota Pematangsiantar
 3. Kasubbag Umum dan Kepegawaian pada pada Dinas Ketenagakerjaan Kota Pematangsiantar
 4. 1 (satu) orang Ahli Muda- Mediator
 5. 2 (dua) orang Ahli Muda- Pengantar Kerja

TIM PENANGGUNGJAWAB PENGUMPULAN DATA/INFORMASI LAPORAN KINERJA DINAS KETENAGAKERJAAN KOTA PEMATANGSIANTAR

1. SEKRETARIAT :
 1. Sekretaris Dinas Ketenagakerjaan Kota Pematangsiantar
2. BIDANG P3TK :
 2. Kepala Bidang Pendayagunaan, Pelatihan dan Produktifitas Tenaga Kerja
3. BIDANG HIPK :
 3. Kepala Bidang Hubungan Industrial, Perselisihan dan Kelembagaan

KEPALA DINAS,

ROBERT SITANGGANG, S.STP., M.Si

NIP. 19810713 200012 1 001

